



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DI KOTA PADANG

Ferrya Hamid Loedy^{1(a)}

¹Magister Adinistrasi Publik, Universitas Negeri Padang

^{a)}ferryahamidloedy@gmail.com

ABSTRACT – *This study aims to describe: 1) To describe the implementation of empowerment of farmer communities by the Padang City Agriculture Service. 2) To describe the inhibiting factors in the implementation of a community empowerment program by the Padang City Agriculture Service. 3) To describe solutions in overcoming the inhibiting factors in community empowerment by the Padang City Agriculture Service. This research method uses a qualitative approach with the determination of informants using purposive sampling technique. Data obtained using in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the implementation of empowerment of farmer communities. The results of the study indicate that the form of empowerment organized by the Agriculture Service is in the form of assistance with agricultural machinery (alsintan), plant seeds, and irrigation. Assistance provided by this government in the context of self-sufficiency programs. Assistance is given to the community through farmer groups. The inhibiting factor of community empowerment consists of agricultural activities only limited to fulfilling their daily needs, still not oriented to the development of improving the welfare of farmers, farmers lack the capital and difficulties in marketing products and the difficulty of licensing. Based on the explanation above, it can be concluded that the empowerment of farming communities in the city of Padang still has several obstacles.*

Keywords : *Community development, Farmers*

Corresponding author. Email. *ferryahamidloedy@gmail*

How to cite this article. Leody, F. Hamid. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Petani di Kota Padang. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Volume 1 (4), Hal. 20-27.

<http://jmiap.ppj.unp.ac.id>

ISSN : 2684-818X (Online), ISSN : 2338-7378 (Print)

Copyright©2019. Published by Pusat Kajian-Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat (PK-P2M) FIS UNP Padang

PENDAHULUAN

Dalam era yang semakin berkembang ini, salah satu tuntutan bagi sebuah negara berkembang adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan terlaksana dengan baik apabila ada koordinasi dari segenap masyarakatnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia atau individu seutuhnya dan masyarakat seutuhnya. Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. UU no. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 3 bab II asas dan tujuan berbunyi: "Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: (1) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; (2) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (3) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (4) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (5) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan (6) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial".

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunandengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas.

Sunyoto Usman (2008:33-40) di dalam masyarakat, dapat dikemukakan dua macam keadaan : (1) terdapat kemiskinan sekaligus kesenjangan, atau (2) tidak terdapat kemiskinan tapi boleh jadi masih ada kesenjangan. Upaya penanggulangan kemiskinan sangat kompleks dan rumit, dan upaya menanggulangi kemiskinan sekaligus kesenjangan jauh lebih

kompleks dan lebih rumit. Secara teoritis, faktor penting lain yang ditengarai membuat desa menjadi tidak berdaya adalah produktivitas yang rendah dan sumber daya manusia yang lemah. Perbandingan antara hasil produksi dan jumlah penduduk menjadi tidak seimbang.

Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga dapat berjalan seperti apa yang sudah dicita-citakan.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Kajian keadaan pedesaan secara partisipatif adalah salah satu tahap dalam upaya meningkatkan kemandirian, hasil panen dan kesejahteraan masyarakat dalam hidupnya. Kajian keadaan pedesaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan percaya diri masyarakat dalam mengidentifikasi serta menganalisa situasi, potensi dan masalahnya sendiri. Dalam kajian keadaan pedesaan secara partisipatif melalui Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat dapat memanfaatkan informasi dan hasil kajian yang dilakukan bersama oleh masyarakat bersama tim fasilitator, untuk mengembangkan rencana kerja masyarakat petani agar lebih maju dan mandiri.

Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan top-down yang sering kali dipakai oleh lembaga-lembaga yang mengumpulkan informasi dari masyarakat melalui Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk kepentingan kelancaran program mereka. Dalam program semacam ini masyarakat hanya diikuti tanpa diberikan pilihan. Hasil dari kajian keadaan pedesaan secara partisipatif berupa gambaran tentang masalah yang dihadapi masyarakat, potensi serta peluang pengembangan. Hasil ini sebagai dasar untuk tahapan berikutnya dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Ukuran keberhasilannya adalah kemajuan fisik atau luasan tanaman, yang belum menyentuh pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) petani dan kelembagaan, belum memanfaatkan kearifan tradisional sebagai modal sosial (social capital), belum

mengakomodasi tata nilai dan kelembagaan informal masyarakat lokal sebagai pondasi kelembagaan formal pengelolaan lahan, serta belum diadaptasikan dengan keragaman karakteristik bio-fisik lokasi, sosial dan budaya masyarakat lokal. Sehingga partisipasi masyarakat dalam pelestarian lahan menjadi sangat minim dan terabaikan. Akibatnya tingkat keberhasilan pembangunan usaha budidaya tanaman sangat rendah dan sekaligus masyarakat tetap miskin atau malah menjadi tambah miskin. Efek negatif berikutnya kemiskinan tersebut telah memicu semakin maraknya penebangan liar, perambahan kawasan, dan lain-lain yang semakin mengakibatkan parahnya kerusakan lahan. Sementara itu keberadaan dan ketergantungan masyarakat lokal terhadap sumber daya alam sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan tanaman pertanian atau pengelolaan lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Dengan kata lain sasaran pengelolaan lahan secara maksimal tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau kebudayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan dan mempunyai tujuan untuk mencapai sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial (Sofa, 2015).

Shardlow (dalam Adi, 2008) melihat bahwa pengertian pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan atau kemampuan orang atau kelompok lemah terkait akses informasi ke sumber daya, partisipasi atau keterlibatan dalam pembangunan, memegang pertanggungjawaban

pihak yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan kemampuan membuat keputusan dengan dukungan lembaga lokal (Bhimo, 2012). World Bank (dalam Ayuningtyas, 2014) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (an-going) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja (Adi, 2008).

Pemberdayaan Masyarakat Petani

Pemberdayaan petani menurut Kepala Badan SDMP dilakukan dengan 5 (lima) jurus yakni: (1) Kegiatan agribisnis harus berorientasi pasar (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas); (2) Usaha agribisnis harus menguntungkan dan comparable dengan usaha lainnya; (3) Agribisnis merupakan kepercayaan jangka panjang; (4) Kemandirian dan daya saing usaha; (5) Komitmen terhadap kontrak usaha. Pemberdayaan masyarakat petani adalah keterkaitan antara pemberian akses bagi masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat petani (Rahayu, 2010).

Pemberdayaan kelembagaan petani meliputi: (1) Petani sub sisten tradisional yang telah berubah menjadi petani moderen berwawasan agribisnis difasilitasi untuk membentuk kelembagaan petani melalui proses partisipatif dan “bottom-up”; (2) Untuk membentuk kelembagaan petani yang kokoh, perlu disusun suatu instrumen pemberdayaan kelompok tani. (3) Instrumen pemberdayaan kelompok tani yang perlu dipertimbangkan antara lain : (a) Adanya interest/kepentingan yang sama di antara petani dalam kelompok; (b) Adanya jiwa kepemimpinan dari salah satu petani di dalam kelompok; (c) Adanya kemampuan manajerial dari petani di dalam kelompok; (d) Adanya komitmen dari petani untuk membentuk kelembagaan petani; (e)

Adanya saling kepercayaan di antara petani di dalam kelompok.

Pemberdayaan usaha tani meliputi kegiatan: (1) Fasilitasi kelompok usaha tani yang tidak feasible dan tidak bankable melalui bantuan langsung masyarakat untuk mengembangkan usaha agribisnis; (2) Mendorong kelompok usaha tani yang tidak feasible dan tidak bankable menjadi usaha yang feasible tetapi belum bankable; (3) Fasilitasi kelompok usaha tani yang feasible tetapi belum bankable dengan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Usaha Rakyat untuk mengembangkan usaha agribisnis; (4) Mendorong kelompok usaha tani yang feasible tetapi belum bankable menjadi usaha yang feasible dan bankable; (5) Untuk mendukung kelompok usaha tani yang feasible dan bankable, Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif agar investasi domestik dan investasi asing masuk ke sektor agribisnis.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Totok dan Poerwoko, 2013 (dalam Ayuningtyas, 2014) pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan.
- 2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dari perbaikan yang diharapkan.
- 3) Mengembangkan kemampuan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- 4) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaatnya.
- 5) Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
- 6) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.

Petani

Petani adalah orang yang mengusahakan atau terlibat secara langsung atau tidak langsung, atau sewaktu-waktu dalam kegiatan usahatani dan kesibukan lain yang berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan keluarga petani di pedesaan (Mardikanto, 1982). Menurut Hernanto, 1993 petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya dalam bidang pertanian dalam arti luas, yang meliputi usahatani pertanaman, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan. Petani adalah orang yang mengusahakan atau mengelola usaha pertanian baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Faktor-Faktor yang Menghambat Aktivitas Usaha Tani

Menurut Harsono (2009), kebijakan pertanian yang lebih memfokuskan pada peningkatan produksi menyebabkan kualitas hidup petani kurang diperhatikan. Kebijakan pertanian ternyata menempatkan petani di posisi bawah meskipun petani berperan sebagai pemain utama dalam sektor pertanian. Dari berbagai penelitian maka ada beberapa factor yang turut mempengaruhi aktivitas usaha tani antara lain:

- 1) Sikap mental Salah satu hambatan yang turut mempengaruhi aktivitas usaha tani adalah masalah sikap mental. Dengan adanya hambatan sikap mental, maka para petani akan sulit berkembang secara mandiri kalau tidak mampu merubah sikap mereka. Kalau dilihat dari tingkat kesejahteraan petani saat ini dapat dikatakan relatif rendah dimana terdapat sikap petani yang menghambat pembangunan pertanian antara lain a). sebagian besar adalah petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya kemudian luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi; terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan; tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik; infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai ; Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (bargaining position) yang sangat lemah; dan Ketidak-mampuan,

kelemahan, atau ketidak-tahuan petani sendiri.

- 2) Faktor Permodalan Masalah permodalan bagi para petani merupakan hal yang sangat krusial. kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Harapannya, tentu akan terjadi peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian yang akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor lain seperti industri dan jasa. Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian, dipengaruhi oleh berbagai aspek. Salah satu aspek yang dapat berpengaruh pada keberhasilan upaya peningkatan hasil pertanian adalah permodalan. Karena rendahnya aspek permodalan akan mempengaruhi tingkat produktivitas bagi usaha tani. Namun dari pengalaman masa lalu banyak kendala yang mempengaruhi pemberian permodalan bagi masyarakat petani dimasa lalu, karena kegagalan program pemerintah dalam memberikan paket kredit lunak seperti program KUT, KUD, maupun pemberian permodalan lewat perbankan. Imbasnya adalah kepada petani yang menjadi korban berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pihak perbankan dengan sangat hati-hati dan selektif untuk memberikan permodalan kepada petani kecuali kelayakan usaha tani benar-benar dianggap mandiri, dengan kata lain para petani harus mengusahakan usaha mereka sendiri baru mendapatkan permodalan. Pemberian permodalan kenyataannya hanya berlaku bagi para petani yang sudah mapan sedangkan petani tradisional jauh dari harapan untuk mendapatkan permodalan, karena berkaitan dengan agunan, kelayakan usaha. Jadi sangat sulit bagi para petani tradisional untuk bisa mengakses permodalan, kecuali dapat diberikan kemudahan.
- 3) Faktor Pemasaran Pasar merupakan kunci terakhir dalam pengembangan usaha bagi aktivitas usaha tani, karena apabila tidak tersedianya pasar maka produksi yang dihasilkan oleh para petani tidak akan memberikan manfaat dan kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi keluarga petani. Oleh karena itu pasar akan sangat menentukan kesimbangan usaha tani. Seringkali pemasaran bagi para

petani menjadi kendala karena dipengaruhi oleh masalah turunnya harga satuan produksi yang tidak seimbang dengan pendapatan petani, karena besarnya biaya yang dikeluarkan seperti pupuk, tenagakerja, bibit maupun biaya-biaya lainnya.

- 4) Faktor Kelembagaan Masyarakat Petani Kelembagaan dalam masyarakat pedesaan di Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu kala, dengan fungsi utamanya sebagai kelembagaan gotong-royong (kerjasama) terutama dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.
- 5) Faktor Pendidikan Petani Sektor pertanian Indonesia masih terkendala dengan masih rendahnya tingkat pendidikan para petaninya, mayoritas pendidikan mereka lulusan sekolah dasar, sehingga tak heran jika produksi pertaniannya kurang berdaya saing tinggi. Dengan rendahnya tingkat pendidikan petani dapat mempengaruhi rendahnya produktivitas dan etos kerja petani, petani Indonesia lebih banyak merupakan petani sub sistem tradisional. Artinya, petani tersebut hanya berpikiran untuk mengolah hasil pertaniannya untuk mencukupi kebutuhannya saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, yaitu di Dinas Pertanian Kota Padang. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Penggunaan *system purposive sampling* dalam penelitian ini agar peneliti mendapatkan data yang valid dan maksimal. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dari informan. Data sekundr diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap literature yang dapat menunjang penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara melakukan member check sampai dicapai tingkat kejenuhan data. Proses annalisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Petani oleh Dinas Pertanian Kota Padang

Dinas Pertanian Kota Padang memiliki 3 bagian, yaitu bagian tanaman pangan hortikultura, peternakan, dan pertanian. Untuk bagian pertanian, Dinas Pertanian Kota Padang mempunyai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan petani di Kota Padang. Bentuk dari pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian adalah berupa bantuan alat mesin pertanian (alsintan), bibit tanaman, dan irigasi. Bantuan yang disediakan oleh pemerintah ini dalam rangka program swasembada. Bantuan diberikan kepada masyarakat melalui kelompok tani. Di Kota Padang sendiri ada sekitar 365 kelompok tani yang terdata. Pembentukan kelompok tani berdasarkan kepada hamparan, maksudnya kelompok tani dibentuk berdasarkan kepemilikan lahan yang berdekatan. Luas sawah di Kota Padang kurang lebih 6.000 ha. Pembentukan kelompok tani memiliki prosedur dan proses tersendiri, masyarakat yang hendak membuat kelompok tani minimal harus berjumlah 10-15 orang. Kemudian pengurusan tersebut dibantu oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang ada di masing-masing kelurahan. Untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, setidaknya kelompok tani harus berdiri minimal 2 tahun.

Alat mesin pertanian diberikan kepada kelompok tani dengan tujuan agar produktifitasnya meningkat dengan biaya yang rendah. Salah satu bentuk alsintan yang diberikan oleh pemerintah adalah *Combain Harvestand* yang dipergunakan untuk membantu petani dalam penen padi. Cara kerja *Combain Harvestand* mulai dari pemotongan batang padi sampai padi masuk karung. Mesin *Combain Harnestand* ini sudah diberikan kepada kelompok tani di Kota Padang sebanyak 8 unit. Salah satu daerah yang sudah menggunakan mesin ini adalah daerah Lubuk Kilangan. Tentunya dengan adanya mesin ini pekerjaan memanen padi menjadi lebih efektif dan efisien dalam hal tenaga maupun dalam hal waktu. Selain itu didaerah Lubuk Kilangan sendiri sudah tidak banyak lagi buruh tani, sehingga bantuan mesin ini sangat membantu masyarakat setempat.

Pemberian bibit tanaman bertujuan untuk meningkatkan produktifitas petani. Bibit yang diberikan kepada petani antara lain bibit kakao, pala, cengkeh, dan karet. Petani di Kota Padang pada umumnya menggunakan bibit yang telah digunakan sebelumnya, sehingga rentan untuk diserang hama. Oleh karenanya, pemerintah menyediakan bibit unggulan yang sudah teruji dan akan meningkatkan produktifitas petani.

Pembangunan irigasi yang difasilitasi oleh pemerintah melalui program pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan produktifitas petani. Pembangunan ini tidak dilakukan pada semua lahan pertanian di Kota Padang, namun dibangun pada lahan pertanian yang produktif. Lahan produktif di Kota Padang antara lain di Koto Tengah, Kuranji, Bungus, Pauh, dan Lubuk Begalung. Kriteria lahan yang produktif dilihat dari tingkat kesuburan dan dominasi mata pencaharian masyarakat.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas Pertanian Kota Padang

Menurut Harsono (2009), kebijakan pertanian yang lebih memfokuskan pada peningkatan produksi menyebabkan kualitas hidup petani kurang diperhatikan. Dalam hal ini peneliti hanya membatasi penelitian pada 3 indikator factor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Sikap mental Salah satu hambatan yang turut mempengaruhi aktivitas usaha tani adalah masalah sikap mental. Dengan adanya hambatan sikap mental, maka para petani akan sulit berkembang secara mandiri kalau tidak mampu merubah sikap mereka. Kalau dilihat dari tingkat kesejahteraan petani saat ini dapat dikatakan relatif rendah dimana terdapat sikap petani yang menghambat pembangunan pertanian antara lain a). sebagian besar adalah petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya kemudian luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi; terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan; tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik; infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai. Struktur pasar yang

tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (*bargaining position*) yang sangat lemah; dan Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana terdapat kurangnya sikap mental masyarakat tani yang pola pikir masyarakat yang masih tradisional dan masih berorientasi pada kecukupan kebutuhan harian. Artinya kegiatan pertanian hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan harian hidupnya, masih belum berorientasi pada perkembangan peningkatan kesejahteraan hidup petani.

- 2) Faktor Permodalan Masalah permodalan bagi para petani merupakan hal yang sangat krusial. Kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Harapannya, tentu akan terjadi peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian yang akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor lain seperti *industry* dan jasa. Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian, dipengaruhi oleh berbagai aspek. Salah satu aspek yang dapat berpengaruh pada keberhasilan upaya peningkatan hasil pertanian adalah permodalan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti temui dimana masyarakat masih memiliki kekurangan dari segi modal.
- 3) Faktor Pemasaran Pasar merupakan kunci terakhir dalam pengembangan usaha bagi aktivitas usaha tani, karena apabila tidak tersedianya pasar maka produksi yang dihasilkan oleh para petani tidak akan memberikan manfaat dan kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi keluarga petani. Oleh karena itu pasar akan sangat menentukan kesimbangan usaha tani. Seringkali pemasaran bagi para petani menjadi kendala karena dipengaruhi oleh masalah turunnya harga satuan produksi yang tidak seimbang dengan pendapatan petani, karena besarnya biaya yang dikeluarkan seperti pupuk, tenagakerja, bibit maupun biaya-biaya lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari segi pemasaran masih terjadi permasalahan, karena untuk pemasaran ke supermarket harus melalui perizinan dari BPOM, sementara untuk mengurus izin tersebut masih ditemui kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

Solusi dalam Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Pertanian Kota Padang

Untuk mengubah pola pikir masyarakat, dinas pertanian menempatkan PPL pada tiap-tiap kelurahan yang membantu dan mengarahkan masyarakat. PPL di Kota Padang berjumlah 48 orang, mempunyai kelurahan binaan masing-masing. PPL bertugas untuk membantu masyarakat dalam menuntun dan mengarahkan masyarakat serta memberikan pelatihan dan informasi mengenai pertanian kepada masyarakat. Bentuk pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, antara lain :

- a) Pelatihan operator alsintan
- b) Teknik budidaya
- c) Sekolah lapang pertanian
- d) Pelatihan hasil pertanian / industri

Keluhan petugas pemberdayaan masyarakat di Dinas Pertanian Kota Padang adalah petani yang manja. Maksudnya adalah para petani yang cenderung mengharapkan bantuan dari pemerintah saja. Jika ada bantuan yang diberikan, para petani bersemangat untuk membentuk kelompok tani agar mendapatkan bantuan. Kemudian bantuan yang diberikan tidak dimanfaatkan sebagaimana harusnya.

Untuk mengatasi hama wereng yang menyebabkan petani gagal panen, maka pemerintah menyediakan jasa asuransi melalui Asuransi Jasindo. Ada 2 macam asuransi yang disediakan pemerintah, yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS). Sistematis asuransi ini, untuk asuransi petani padi, masing-masing kelompok tani membayar 100.00/ha, namun petani hanya membayar premi 36.000/ha dibayar perbulan sementara sisanya 44.000 dibayarkan oleh pemerintah. Untuk asuransi petani sapi, masing-masing kelompok tani membayar 1.000.000/bulan, namun petani hanya membayar premi 400.000/bulan sementara sisanya dibayarkan oleh pemerintah. Sistem ini sama dengan sistem subsidi. Bantuan yang di programkan oleh pemerintah direalisasikan berdasarkan anggaran yang diajukan. Jika anggaran tidak mencukupi maka pemerintah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat (Kementerian). Kemudian bantuan yang diberikan berupa alat dan satuan kerja.

Bagi masyarakat tani yang kekurangan modal untuk berusaha, pemerintah

menyediakan bantuan modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan. Masing-masing kelompok tani diberikan modal awal sebesar 1.000.000. Modal awal tersebut merupakan pinjaman yang nantinya akan dikembalikan setelah panen. Sistem KUR ini seperti sistem koperasi.

Dinas Pertanian Kota Padang memiliki pabrik kakao yang berlokasi di Bungus sebagai tempat pemasaran kakao para petani khususnya di Kota Padang. Kemudian kakao yang ditampung diolah menjadi olahan setengah jadi dan olahan siap pakai. Namun untuk mengatasi semua permasalahan pemasaran dan perizinan yang ada di Kota Padang, pemerintah masih memiliki keterbatasan. Sehingga tidak semua produk yang dihasilkan memiliki izin MUI maupun izin BPOM.

PENUTUP

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) kegiatan pertanian hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan harian hidupnya, masih belum berorientasi pada perkembangan peningkatan kesejahteraan hidup petani
- 2) Petani kurang memiliki modal dalam melaksanakan kegiatan pertanian
- 3) Susahnya pemasaran produk dan sulitnya perizinan untuk memasarkan hasil pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Harsono. 2009. *Distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi petani*. CV Rajawali Jakarta.
- Husaini Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, 2003, *Pemberdayaan Masyarakat Petani*, PT Fokus Harapan Jakarta.
- Bayu Krisnamurthi. 2008. *Dinamika Kelompok Tani dalam mengatasi kemiskinan Petani*. Fokus Media Jakarta.
- Kartasasmita Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alumni.

Sofa, Haida. 2015. Skripsi. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Tani di Dusun Gondang Desa Campurejo Kecamatan Treteb Kabupaten Temanggung*. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Diunduh dari <http://digilib.uinsuka.ac.id/16862/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses pada tanggal 14 September 2017).

Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Afabeta, 2012), hlm. 167